Unnes Political Science Journal

Vol. 1, No. 2, July 2017, pp. 181 – 191

ISSN 2549-0737 (Print)





Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah **Tahun 2016**

Nota Vianta Sembiring ¹, Noorochmat Isdaryanto ¹, Andi Suhardiyanto ¹ ¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2016 Accepted Nov 26th, 2017 Published Jan 15th, 2017

Keyword:

Work Program; Badan Kesbangpol Linmas; National Insight

Paper type: Research Paper

Abstract

Indonesia is a very diverse, so vulnerable to conflict in the community. Conflicts occurred in indonesia is religion conflict and terrorism by the radical. One of the provinces in indonesia with the number of cases related high religion conflict and terrorism is provincial central java, because last year 2016 according to the social studies and religion semarang (elsa) is 20 a case that occurred. Seen from the number of religion conflict and terrorism, it can be summed up the community in the central java has made their faded nationality insight. Indonesia has a special institution deal with associated nationality insight the national unity political and protect people.

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Sembiring, N., Isdaryanto, N., & Suhardiyanto, A. (2017). Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Unnes Political Science Journal, 1(2), 181-191. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20104

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dapat merubah segalanya termasuk kepribadian suatu bangsa yang telah tertanam setelah bertahun tahun bahkan berabad abad lamanya. Perubahan itu berasal dari berbagai penyebab, salah satunya yaitu dari efek globalisasi yang telah berkembang pesat di seluruh mancanegara. Globalisasi adalah proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Hidayat dan Azyumardi (2008:25), Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Enis Prihastuti (2013:35 – 39), Globalisasi hakekatnya Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.

Email: notavianta327@gmail.com

adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, ditawarkan yang pada suatu titik kesepakatan bersama menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Syarbaini (2009:316), Globalisasi adalah suatu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh kedudukan geografi suatu negara. Kehadiran globalisasi membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia baik positif maupun negatif di berbagai bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain yang bisa mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa, karena globalisasi dapat berakibat pada perubahan pola hidup, pola pikir, dan prilaku yang tidak sesuai dengan norma- norma kebudayaan suatu bangsa. Pengertian globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yaitu suatu proses masuknya keruang lingkup dunia. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Globalisasi menyebabkan akses masuk atau keluarnya budaya suatu bangsa dapat dengan mudah ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pengaruh globalisasi yang mendunia memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi bangsa ini. Di suatu sisi dampak globalisasi memberikan keuntungan bagi bangsa ini yaitu Indonesia dapat tampil dengan segala keunikan ciri khas dan budaya yang dimilikinya di hadapan Negara lain yang ada di dunia ini dan menjadi dikenal. Di suatu sisi globalisasi memberikan dampak yang buruk bagi bangsa ini yaitu negara lain dapat dengan mudah mengakses mengenai segala sesuatunya, masuknya budaya barat (westernisasi) dan juga masuknya radikalisme dari negara lain . Sehingga globalisasi suka tidak suka akan mempengaruhi nilai-nilai yang telah ada sebelumnya, nilai itu bisa berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk. Semua itu tergantung dengan bagaimana suatu negara menyikapi hal itu. Hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi di dalam berbagai aspek kehidupan. Pergaulan antar bangsa yang semakin ketat dan kental akan menghasilkan beberapa proses yaitu akulturasi, saling meniru, saling mempengaruhi, bahkan dapat menimbulkan primodialisme (beranggapan bahwa bangsanya yang terbaik diantara bangsa lain) sehingga diperlukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan sebagai warga negara.

Melihat dari lunturnya wawasan kebangsaan di masyarakat, dengan banyaknya konflik SARA ataupun gerakan radikal, maka sangat penting ditekankan pendidikan wawasan kebangsaan sejak dini. Pengembangan wawasan di lembaga pendidikan adalah salah satu solusinya, namun karena lemabaga pendidikan lebih fokus pada teori bukan langsung

paraktek terjun kelapangan, maka pemerintah membentuk lembaga pemerintah yang lain yang fokus untuk mengurusi pengembangan wawasan kebangsaan di Indonesia yaitu Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas). Badan Kesbangpol dan Linmas tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat Provinsi dibawah Gubernur, tingkat kota dibawah Wali Kota, dan Kabupaten dibawah Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2008 pasal 20 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat berfungsi untuk menjaga kesatuan bangsa. Semua fungsi Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan dengan program kerja yang telah disusun dan akan dilaksanakan dalam satu tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan pembuatan program kerja pengembangan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, bagaimana implementasi pengembangan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, dan apa faktor penghambat dan pendukung dalam mengembangkan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana menambah bahan kajian dalam khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang kelembagaan. Didalam penelitian ini akan diketahui pentingnya program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas dalam pengembangan wawasan kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, karena wawasan kebangsaan adalah hal besar yang harus tetap dijaga dan dikembangkan untuk membentengi masyarakat dari pengaruh negatif pada zaman sekarang yang merupakan era globalisasi. Manfaat Praktis penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dan melaksaaan program kerja pengembangan wawasan kebangsaan dan sebagai bahan acuan dalam membuat program kerja untuk Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten atau Kota.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2016: 4) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata tertulis atau lisan yang mencakup catatan laporan dan dokumentasi. Penelitian ini mencoba menyelidiki, memahami, dan menjelaskan pelaksanaan program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas dalam pengembangan wawasan kebangsaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban (Moleong, 2016:93). Fokus yang berhubungan tersebut dalam hal ini berupa data empiris, konsep, pengalaman, pengetahuan, pengalaman sendiri atau unsur lainya. Jika kedua faktor itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda-tanya dan perlu dicari solusinya. Berdasarkan konsep di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: pertama landasan Badan Kesbangpol dan Linmas dalam mengembangkan wawasan kebangsaan. Kedua cara pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Ketiga faktor penghambat dan pendukung Badan Kesbangpol dan Linmas dalam pengembangan wawasan kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016.

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2013: 172). Sumber data dalam penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2016:157) menyatakan bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara. Data primer yang dibutuhkan adalah landasan program kerja, hambatan dan pendukung pelaksanaan program kerja, dan pendekatan, metode, beserta materi yang dipakai ketika pengembangan wawasan kebangsaan tahun 2016. Selain wawancara sebagai data yang diperoleh secara langsung, maka ada data tambahan seperti dokumen yang menjadi sumber data sekunder. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:216), dokumentasi

adalah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah dokumen atau catatan yang berupa visi misi, tupoksi, rencana program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas, bentuk kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas tahun 2016, dan dokumen resmi dari bagian Kesbangpol dan Linmas.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, (Moleong, 2016:186). Untuk mendapatkan data-data yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu: Sekretaris Sub Bagian Ideologi dan Wasbang (Muslichah Setiasih, S.IP), Kepala Sub Bagian Program (Sulistyo Yuli Utomo, S.Sos.MM), dan Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian (Anik Emyati, SH, MM). Wawancara digunakan untuk mengorek informasi serta mengumpulkan data dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang meliputi landasan pembuatan program kerja pengembangkan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, materi wawasan kebangsaan yang di tanamkan, implementasi pengembangkan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Sumber-sumber Peneliti berupa arsip, dokumen, buku, foto, video visual. Penelitian ini metode dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data -data tertulis dan melakukan foto-foto dengan narasumber.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengeceken atau sebagai pendamping terhadap data lain, dengan cara wawancara yang tidak hanya dilakukan sekali sampai peneliti menemukan jawaban dari suatu pertanyaan tertentu. Teknik trianggulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber data. Menurut Patton, trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2016: 330). Penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Dalam peneliatian, analisis data penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting. Metode analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2016: 280). Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganlisis dalam penelitian kualitatif, yaitu (1). Analisis data lapangan. (2). Analisis data setelah pengumpulan data selesai. Cara yang pertama dilakukan pada waktu kegiatan pengumpulan data dilapangan sedang berlangsung, cara ini dilakukan berulang-ulang dan hasilnya harus diuji kembali, sedangkan cara kedua dilakukan setelah proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara yang kedua dengan alasan bahwa analisisnya akan lebih lengkap, dengan demikian tidak perlu diulang-ulang. Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisa model interkasi Milles dan Huberman. Kegiatan pokok analisa ini meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:20). Berikut adalah tahapan analisis yang akan dilakukan: pertama pengumpulan data, yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah program kerja pengembangan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol dan Linmas tahun 2016, materi wawasan kebangsaan dan juga hal-hal yang melekat pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. Kedua reduksi data, yaitu data-data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan pada penyederhanakan data, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992: 16). Dengan analisis ini memudahkan peneliti dalam menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini maka kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. Dalam reduksi data ini peneliti memanfaatkan catatan lapangan untuk mempermudah data mana yang diperlukan dan data mana yang harus dibuang, sehingga menghasilkan kesimpulan final. Ketiga penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matrik. Keempat penarikan kesimpulan, yaitu data-data hasil penelitian setelah direduksi, disajikan langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari data-data yang telah didapatkan dari laporan penelitian selanjutnya digabungkan dan disimpulkan serta diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 1992: 19). Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti menggunakan dasar kecermatan dalam penggunakan setiap data. Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil penelitian dengan catatan lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai atau belum, kemudian menarik kesimpulan dari setiap item tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 53 kegiatan terkait wawasan kebangsaan tentu kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian adalah: *pertama*, landasan program kerja pengembangan wawasan kebangsaan adalah visi misi, tupoksi, dan peraturan pemerintah. *Kedua*, dalam implementasi program kerja wawasan kebangsaan, maka ada 15 program kerja dengan total 53 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah sosialisasi dan forum diskusi, serta yang paling jarang pendekatan pelatihan, kemudian metode penyampaian yang paling sering adalah dengan metode pendidikan. *Ketiga*, faktor penghambat, *pertama*, beban kerja tidak seimbang dengan jumlah karyawan, *kedua*, kurangnya sumber daya manusia karyawan di bidang konseptor. Faktor pendukungnya,

pertama anggaran mencukupi semua kegiatan, kedua kerjasama yang baik antara Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten atau Kota. Jika dilihat dari skala pengukur kinerja, maka program kerja pengembangan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 hasilnya kategori baik, namun jika dilihat hasil nyata dilapangan, maka kegiatan yang sudah dilaksanakan kurang memberi hasil dimasyarakat. Berikut data dari Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang (eLSA) terkait jumlah kasus SARA yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2013 sampai 2018:

Tabel 1. Jumlah Kasus SARA di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2018

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	6
2	2014	10
3	2015	14
4	2016	20

Sumber: Internet (http://m.tempo.co)

Dari tabel diatas bisa dilihat dari tahun 2013 sampai 2016 kasus SARA yang terjadi di Jawa Tengah terus meningkat, sehingga kurang berdampaknya kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang sudah dilakukan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi beberapa faktor.Berdasarkan penelitian faktor penghambat Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan adalah beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai dan sumber daya manusia yang masih kurang terkhusus pada Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, karena bidang tersebut yang mengurusi masalah wawasan kebangsaan. Berikut data yang menerangkat terkait jumlah dan sumber daya manusia pegawai Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:

Tabel 2. Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng Menurut Struktur dan Bidang

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
1. Sub Bagian Program	7
2. Sub Bagian Keuangan	11

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan		
Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.	8	
Kepala Bidang Ketahanan Bangsa		
1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan	4	
Kemasyarakatan	4	
2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi	4	
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri		
1. Sub Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik	4	
2. Sub Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik	4	

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng Bidang Umum dan Kepegawaian

Tabel 3. Pegawai Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

NO	NAMA	NIP
1	Djoko Harjono, S.IP, MM	NIP. 19610704 198202 1 006
2	Drs. Fadjar Sakolo, M.Si	NIP. 19620405 199503 1 002
3	Muslichah Setiasih, S.IP	NIP. 19800901 201001 2 018
4	Tukimin, SE	NIP. 19640608 199003 1 011
5	Siti Lestari, S.Sos	NIP. 19641028 199003 2 010
6	Budi Setiawan	NIP. 19721209 199803 1 004
7	Sarjiyono	NIP. 19730703 200801 1 008

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng Bidang Umum dan Kepegawaian

Selain faktor penghambat Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, tentu mempunyai faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti anggaran yang mencukupi seluruh kegiatan dan kerjasama yang baik Badan Kesbangpol dan Linmas antara Provinsi dengan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kesimpulan yaitu : pertama landasan utama dari Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya,

seperti Peraturan Kemendagri nomor 29 tahun 2011, Peraturan Kemendagri no 71 tahun 2012, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 85 tahun 2008. Kedua implementasi program kerja pengembangan wawasan kebangsaan tentunya sesuai dengan amanat dari peraturan yang menjadi landasan pengembangan wawasan kebangsaan. Pada tahun 2016 Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 15 kegiatan terkait wawasan kebangsaan dan total keseluruhan setelah kegiatan dilakaukan di kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah adalah 53 kegiatan. Dari 15 kegiatan tersebut pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara sosialisasi, kemudian dengan metode pendidikan, seperti seminar dan forum diskusi. Untuk lokasi yang paling sering dijadikan tempat kegiatan, tentunya lokasi yang sering terjadi konflik agama ataupun terorisme, seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Solo, dan Kota Semarang. Ketiga, faktor utama penghambat dan pendukung Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dalam pengembangan wawasan kebangsaan. Faktor penghambat beban kerja tidak seimbang dengan jumlah pegawai dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Faktor pendukung adalah anggaran yang mencukupi seluruh kegiatan dan kerjasama yang baik antara Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi dengan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Saran

Adapun saran penulis terkait penelitian tentang program kerja Badan Kesbnagpol dan Linmas dalam pengembangan wawasan kebangsaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 adalah supaya dalam pengembangan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol dan Linmas tidak hanya fokus terjun langsung dimasyarakat, tetapi juga mengembangkan wilayah jangkauan melalui media sosial, karena pada zaman sekarang masyarkat sangat aktif di media sosial. Melihat hambatan yang dihadapi Badan Kesbangpol dan Linmas dalam menjalankan program kerja pengembangan wawasan kebangsaan, seperti beban kerja tidak seimbang dengan jumlah pegawai dan kurangnya sumber daya manusia pegawai, maka solusi dari penulis terhadap permasalahan tersebut adalah: pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melalui seleksi yang baik. Kedua, memperkuat Kegiatan Belajar Mengajar(KBM) yang ada dimasing-masing daerah di Jawa Tengah, seperti lingkungan sekolah dari TK sampai Universitas. Ketiga, memperkuat sistem dan komunikasi antar Badan Kesbangpol dan Linmas di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Enis Prihastuti. (2013). GLOBALISAS. ANALISA.No. 1.Hal. 35 39 htp://m.tempo. co/read/news/2017/01/02/058831934/intoleransi-jawatengah-naik-motif-berulang(2 Agustus 2017).
- Hidayat dan Azyumardi.(2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Miles, Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no 7 tahun 2008 pasal 20 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangnan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Syarbaini.(2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waskito.(2012). Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta:PT. Wahyu Media.
- Ridlwan, M., Muchsin, S., & Hayat, H. (2017). Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(2), 141-158. doi:http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9933